

Aliansi Etnis Kurdi di Perbatasan Selama Krisis Politik Suriah Tahun 2011-2016

Renitha Dwi Hapsari

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Jalan Raya Rngkut Madya, Gunung Anyar, Surabaya 60294

email: rd.hapsari@yahoo.com

ABSTRACT

Ethnic Kurds live in the border area of several countries. They formed ethnic alliances based on ethnic kin. In 2011, when the political crisis occurred in Syria, Syrian Kurds became one of the opposition group, which opposed the government. John W. Crow and R. Noel stated that authoritarian governments generally respond to insecurity by implementing aggressive or militaristic approach. In this case, the Syrian Government uses violence and militaristic actions to suppress the power of opposition groups. Based on Tikhomirov, the response could increase the tendency for separatist groups - territorial and ethnic nationalism. The political crisis also weakens the power and capability of the government, along with the increasing pressure from opposition groups and mass mobilization. This is an opportunity for the Kurdish secessionist movement in Syria. As Peter Ferdinand stated that when strife increases and causes insecurity within the country, the nationalism that can survive is ethnic nationalism. The author also used Suhrke and Noble who stated that the support provided by blood brothers has a significant impact on ethnic groups who facing conflict, both with the state or other ethnic groups.

Keywords: *Ethnic alliances, political crisis, secessionist movement*

Etnis Kurdi tinggal di wilayah perbatasan beberapa negara. Mereka membentuk aliansi etnis berdasarkan ethnic kin. Pada tahun 2011, ketika krisis politik terjadi di Suriah, etnis Kurdi Suriah menjadi salah satu kelompok oposisi yang melakukan perlawanan terhadap pemerintah. John W. Crow dan R. Noel menyatakan bahwa pemerintahan otoriter umumnya merespon ketidakamanan dengan menerapkan kebijakan agresif atau militeristik. Merespon hal tersebut, Pemerintah Suriah melakukan kekerasan dan tindakan militeristik terhadap kelompok oposisi. Berdasarkan Tikhomirov hal tersebut justru meningkatkan tendensi bagi kelompok separatis (territorial and ethnic nationalism). Di sisi lainnya, krisis politik juga menyebabkan kekuatan dan kapabilitas pemerintah melemah seiring meningkatnya tekanan kelompok oposisi dan mobilisasi massa. Hal ini menjadi peluang bagi gerakan secession Kurdi di Suriah. Hal tersebut juga diungkapkan oleh Peter Ferdinand, ketika perseteruan semakin meningkat dan menimbulkan ketidakamanan dalam negara, maka nasionalisme yang dapat bertahan adalah ethnic nationalism. Penulis juga menggunakan pernyataan Suhrke dan Noble yang menyatakan bahwa dukungan yang diberikan berdasarkan faktor genetik oleh blood brothers berdampak signifikan bagi etnis yang sedang menghadapi pertikaian, baik dengan negara maupun dengan kelompok etnis lainnya.

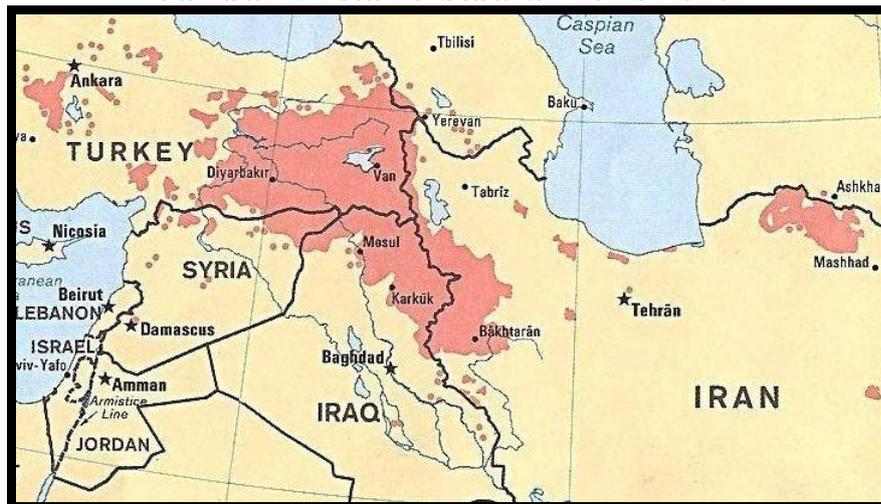
Kata Kunci: *aliansi etnis, krisis politik, gerakan secession*

Pendahuluan

Etnis Kurdi merupakan etnis minoritas yang mendiami wilayah perbatasan di beberapa negara. Berdasarkan data statistik sebanyak 8,1 juta etnis Kurdi tinggal di wilayah Iran, 5,5 juta tinggal di wilayah Irak, 1,7 juta tinggal di wilayah Suriah, dan 14,7 juta tinggal di wilayah Turki (www.cfr.org, 2015). Selain itu, sebanyak lebih dari 1 juta diaspora etnis Kurdi tersebar di beberapa negara, di kawasan Eropa dan Amerika (thekurdishproject.org, 2015). Meski telah terpisah ke dalam beberapa wilayah berdaulat¹, etnis Kurdi memiliki tingkat etnonasionalisme yang tinggi. Mereka memiliki cita-cita untuk melakukan pemisahan diri dari masing-masing negara, kemudian berupaya untuk mendirikan negara Kurdistan – tanah air Kurdi.

Demografi penduduk yang terpusat di wilayah perbatasan memberikan peluang bagi Etnis Kurdi untuk tetap menjalin hubungan lintas batas negara. Hal tersebut tidak terlepas dari adanya *ethnic kin* -ikatan kekerabatan berdasarkan darah atau keturunan. Dalam hal ini, *ethnic kin* menjadi dasar bagi terciptanya *ethnic alliances*. Seperti aliansi yang dilakukan oleh negara, ketika anggota etnis di suatu negara terancam, maka etnis yang berada di negara lain berupaya untuk melindungi atau membantu.

Gambar I. Peta Persebaran Etnis Kurdi



Sumber: www.npr.org, 2014

Bentuk aliansi etnis yang terjalin di antara etnis Kurdi dalam sejarahnya dapat dilihat ketika pada tahun 1987-1988, Etnis Kurdi di Irak mengalami *ethnic cleansing* oleh pemerintah Irak, sebagian yang berhasil bertahan kemudian melarikan diri ke wilayah perbatasan Turki, Iran, dan Suriah untuk mencari perlindungan (Yildiz 2007; Bozarslan 2014). Sebagai timbal baliknya, ketika Etnis Kurdi di Turki Tenggara mendapatkan serangan dari pemerintah, para pemimpin politik PKK berlindung di wilayah Kurdi Irak (Anonim, 2015). Selain

¹ Pada abad ke-14, Kurdistan menjadi wilayah perebutan antara Kekaisaran Ottoman dan Persia. Dalam perkembangannya, Kekaisaran Ottoman diinvasi oleh Barat dan kehilangan beberapa wilayahnya. Perjanjian Lausanne yang ditandatangani oleh Kekaisaran Ottoman dan Sekutu pada 1924 membatalkan isi Perjanjian Sevres (1920) yang sebelumnya berisi tentang pemberian otonomi atau pemerintahan semi-negara kepada Etnis Kurdi, sehingga memisahkan etnis Kurdi ke beberapa wilayah berdaulat.

itu, Pemerintah Turki juga menegaskan bahwa pasukan PYD Suriah memiliki hubungan erat dengan PKK Turki (Marboen, 2016).

Etnis Kurdi yang terdiaspora di beberapa negara lainnya juga membentuk aliansi yang dikenal dengan Kurdistan Communities Union (KCK), Kurdistan National Congress (KNC atau KNK), The Confederation of Kurdish Associations in Europe (KON-KURD) dan The Kurdistan National Congress of North America (KNCNA) (Hevian, 2013). Aliansi tersebut juga memiliki afiliasi dengan partai Kurdi di Irak, Iran, Suriah, dan Turki (Hevian, 2013). Salah satu agenda utama mereka adalah melakukan lobi-lobi politik ke Uni Eropa, PBB, atau organisasi-organisasi internasional lainnya (peaceinkurdistancampaign.com, 2016), guna meningkatkan kesadaran pemerintah dan masyarakat di negara lainnya, bahwa masih ada etnis di beberapa negara yang tidak diakui oleh pemerintahnya, yang mengalami tekanan dan pelanggaran HAM. Upaya tersebut juga dilakukan sebagai salah satu metode untuk menggalang simpati dan dukungan bagi perjuangan Etnis Kurdi untuk mencapai kemerdekaan.

Keinginan atau cita-cita etnis Kurdi untuk mencapai kemerdekaan, membuat etnis Kurdi sebagai ancaman bagi kedaulatan negara. Pemerintah di beberapa negara kemudian melakukan tekanan dan diskriminasi terhadap etnis Kurdi. Tekanan dan diskriminasi tersebut kemudian menimbulkan pemberontakan etnis Kurdi. Di Irak, pemerintah Saddam Hussein pernah melakukan Operasi al-Anfal terhadap etnis Kurdi, sebagai bentuk balasan pemerintah Irak atas aliansi *peshmerga*² dengan pemerintah Iran, yang menyebabkan kekalahan Irak saat Perang Teluk I. Melalui Operasi al-Anfal, Pemerintah Irak berupaya melakukan *ethnic cleansing* terhadap etnis Kurdi dengan menggunakan senjata kimia.³ Merespon hal tersebut, DK PBB mengeluarkan Resolusi No.688 yang memutuskan penerapan Safe Haven bagi wilayah Irak Utara (Mohammed, 2013), yang diikuti dengan pemberian status otonomi bagi Kurdi yang dikenal sebagai KRG -Kurdistan Regional Government.

Seperti etnis Kurdi di Irak, etnis Kurdi di Suriah juga mendapat perlakuan diskriminatif. Pemerintah Suriah melakukan tekanan-tekanan terhadap etnis Kurdi. Berdasarkan Surat Keputusan Legislatif No.93 tanggal 23 Agustus 1962, pemerintah Suriah membentuk Komite Sensus yang membuat ratusan ribu etnis Kurdi beserta dengan keturunannya kehilangan kewarganegaraan (Ammar, 2011). Dengan demikian, etnis Kurdi tidak memiliki hak sebagai warga negara dan Pemerintah Suriah tidak memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan terhadap mereka. Selain itu, pada tahun 1973-1975 mengikuti kebijakan The Arab Belt, Etnis Kurdi di Suriah dipaksa pindah dari tempat tinggalnya di perbatasan (Yildiz, 2005). Selain sebagai upaya reformasi tanah, kebijakan tersebut pada dasarnya diterapkan untuk melemahkan dominasi etnis Kurdi (www.cfr.org, 2015) sekaligus memisahkan etnis Kurdi Suriah supaya tidak menjalin hubungan dengan Etnis Kurdi di Irak dan Turki (Yildiz, 2005). Etnis Kurdi di Suriah juga tidak boleh mengikuti pemilihan, memiliki tanah, hanya dapat bekerja pada bidang tertentu, tidak mendapatkan subsidi makanan dan pelayanan kesehatan, hingga dilarang menikah dengan warga negara Suriah (www.cia.gov, 2017). Etnis Kurdi di Suriah juga dilarang menggunakan bahasa Kurdi di ruang public (Yildiz, 2005). Etnis Kurdi juga dilarang berpindah-pindah di dalam negeri dan ketika

² Peshmerga merupakan sebutan bagi pasukan militer Kurdi di Irak.

³ Operasi Anfal menghancurkan 3.839 desa, 1.957 sekolah, 2.457 masjid, dan 271 klinik (Yildiz, 2007).

mereka memutuskan untuk keluar maka mereka tidak bisa masuk lagi ke Suriah (Ammar, 2011). Upaya-upaya tersebut diterapkan oleh pemerintah Suriah untuk menghilangkan identitas etnis Kurdi.

Perlakuan diskriminatif tersebut meningkatkan etnonasionalisme Etnis Kurdi di Suriah. Perjuangan etnis Kurdi di Suriah dimulai pada tahun 1957, dengan pembentukan KDPS (Kurdistan Democratic Party in Syria) ⁴, yang memperjuangkan pengakuan terhadap eksistensi etnis Kurdi (Meho dan Maghlaughlin, 2001). Namun perjuangan tersebut terhenti ketika pemimpin KDPS ditangkap. Perjuangan Kurdi di Suriah kembali dilakukan pada tahun 2003 dengan pembentukan PYD -Kurdish Democratic Union Party (www.cfr.org, 2015). Sejak awal pemerintahannya pada tahun 2005, Presiden Bashar al-Assad telah memiliki keinginan atau wacana untuk menerapkan kebijakan naturalisasi bagi etnis Kurdi Suriah (KurdWatch, 2010). Keinginan tersebut tidak terlepas dari kesadaran Bashar al-Assad bahwa pada suatu saat etnis Kurdi pasti akan menjadi ancaman bagi pemerintah Suriah -bercermin pada apa yang terjadi pada pemerintahan Saddam Hussein di Irak. Namun dalam kenyataannya, keinginan tersebut belum dapat diterapkan karena tidak mendapatkan persetujuan dari Partai Baath.

Krisis Politik Suriah

Sejak awal masa pemerintahannya, Bashar al-Assad mewarisi beberapa permasalahan yang sebelumnya dihadapi Hafez al-Assad. Permasalahan tersebut meliputi defisit neraca perdagangan yang menyebabkan defisit ekonomi, rendahnya suplai cadangan minyak, pertumbuhan populasi yang pesat, serta tingginya angka pengangguran (Gambill, 2001). Jika tidak segera diselesaikan krisis ekonomi dapat berkembang dan menyebabkan ketidakstabilan dalam negara, yang menjadi awal bagi krisis politik. Selain itu, menurut Ömer Göksel İşyar (2008), krisis dapat terjadi karena faktor eksternal (lingkungan) dan internal (organisasional). Dalam hal ini, krisis Suriah terjadi karena kombinasi dari faktor internal dan eksternal. Dari sisi internal, Suriah mengalami permasalahan kepemimpinan, dimana rakyat tidak lagi mempercayai Presiden Bashar-al Assad sebagai pemimpin Suriah, karena telah gagal mengatasi krisis ekonomi yang terjadi. Dari sisi eksternal, terjadi perubahan politik internasional mengikuti *Arab Spring* yang terjadi di negara-negara Timur Tengah (www.bbc.com, 2017), yang memicu rakyat Suriah untuk melakukan revolusi juga.

Krisis di Suriah mulai terjadi pada tahun 2011. Rakyat yang kecewa dengan Presiden Bashar al-Assad melakukan protes terhadap pemerintah. Sejumlah remaja di Suriah yang mendukung Arab Spring membuat grafiti yang bertuliskan "The Government must go!" di dinding sekolah (www.iamsyria.org, 2017). Hal tersebut memicu kemarahan pemerintah yang kemudian melakukan kekerasan dalam bentuk penyiksaan terhadap para pelakunya. Penyiksaan tersebut membuat salah satu korban meninggal dunia (www.aljazeera.com, 2016). Respon pemerintah yang terlalu agresif kemudian memicu protes massa yang lebih besar yang melakukan demonstrasi di hampir seluruh penjuru Suriah. Pemerintah kemudian merespon demonstrasi tersebut dengan mengerahkan pasukan militer dan melakukan penahanan hingga penembakan terhadap para demonstrator,

⁴ KDPS memiliki afiliasi dengan KDP Irak (www.cfr.org, 2015)

yang kemudian membuat konflik berkembang menjadi perang sipil (www.bbc.com, 2016).

Dalam perkembangan selanjutnya, perang sipil juga memicu munculnya kelompok-kelompok oposisi di Suriah. Dengan memanfaatkan mobilisasi massa, kelompok oposisi membuat tuntutan ekonomi dan politik (Tikhomirov, 2000). Rakyat Suriah dan kelompok oposisi menuntut Presiden Bashar al-Assad agar mengundurkan diri dari jabatannya. Hal ini menandai krisis ekonomi yang terjadi di Suriah berkembang menjadi krisis politik. Pada 20 Maret 2011, Presiden Bashar al-Assad melalui pidatonya mengakui bahwa pemerintah tidak dapat memenuhi kebutuhan dan atau tuntutan masyarakat, serta menyatakan bahwa Suriah sedang dalam keadaan *emergency* (edition.cnn.com, 2016). Namun Bashar al-Assad tidak melakukan upaya apa pun untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik.

Keengganan pemerintah Suriah untuk menyelesaikan krisis politik kemudian membuat rakyat Suriah tidak patuh lagi dan justru melakukan perlawanan terhadap pemerintah. Mendukung perlawanan yang dilakukan oleh rakyat, pemerintah AS kemudian mengeluarkan sanksi ekonomi terhadap Suriah yang kemudian diikuti dengan pembekuan seluruh aset pemerintah, pelarangan penanaman investasi, serta embargo minyak (edition.cnn.com, 2016). Hal yang sama juga dilakukan oleh Uni Eropa dan beberapa negara Liga Arab lainnya. Sanksi ekonomi tersebut diterapkan sebagai upaya untuk melemahkan pemerintahan Bashar al-Assad. Namun dalam kenyataannya upaya tersebut tidak mampu menghentikan kekerasan yang dilakukan oleh pemerintah Suriah.

Kelompok oposisi⁵ pemerintah kemudian berkoalisi membentuk Free Syrian Army sebagai upaya perlawanan bersenjata terhadap pemerintah Suriah. Diperkirakan jumlah pasukan Free Syrian Army mencapai 45.000 hingga 60.000 lebih (Smith dan Mills, 2015). John W. Crow dan R. Noel menyatakan bahwa pemerintahan otoriter umumnya merespon ketidakamanan dengan menerapkan kebijakan agresif atau militeristik. Pemerintah kemudian menerjunkan pasukan militernya dan melakukan pengeboman di beberapa wilayah yang menjadi pusat pemberontakan. Sebagai balasannya, Free Syrian Army kemudian melakukan pengeboman terhadap wilayah Damaskus (www.bbc.com, 2017) yang merupakan wilayah ibukota dan pusat pemerintahan. Pada akhirnya, Free Syrian Army berhasil menguasai wilayah Aleppo (www.bbc.com, 2017) yang merupakan kota terbesar kedua, dengan penduduk paling banyak di Suriah. Setelah perjuangan selama 6 bulan, pemerintah Suriah yang mendapatkan dukungan dari Iran dan Turki berhasil mengambil alih kembali wilayah ini (www.bbc.com, 2016).

Selain Free Syrian Army, pada Oktober 2011, kelompok oposisi juga membentuk koalisi yang dikenal sebagai New Syrian National Council (SNC) yang merupakan wadah untuk mempersiapkan transisi politik di Suriah (www.bbc.com, 2017). Dalam pertemuannya, SNC membahas perubahan konstitusi dan sistem pemerintahan di Suriah. Mayoritas anggota SNC menginginkan pemerintahan Suriah lebih mengarah pada sistem desentralisasi. Dengan demikian, diharapkan pemerintahan baru nantinya lebih dapat mengakomodasi kepentingan semua kelompok di Suriah.⁶

⁵ Terdapat sekitar 13 kelompok oposisi di Suriah

⁶ SNC menolak otonomi Kurdi di Suriah, yang dianggap sebagai ancaman terhadap keutuhan negara.

Krisis politik juga menyebabkan kekuatan dan kapabilitas pemerintah melemah seiring meningkatnya tekanan kelompok oposisi dan mobilisasi massa. Selama krisis politik terjadi di Suriah, ketakutan pemerintah Bashar al-Assad semakin meningkat. Krisis politik membuat pemerintah Suriah menarik pasukannya dari wilayah Suriah Utara untuk mengamankan wilayah ibukota Damaskus di Suriah bagian selatan. Hal ini menjadi peluang bagi gerakan secession Kurdi di Suriah. PYD dan sayap militernya YPG, memanfaatkan peluang tersebut dan mengambil alih kontrol atas wilayah tersebut, diikuti dengan pendirian otonomi Kurdi di Suriah Utara (us.boell.org, 2016).

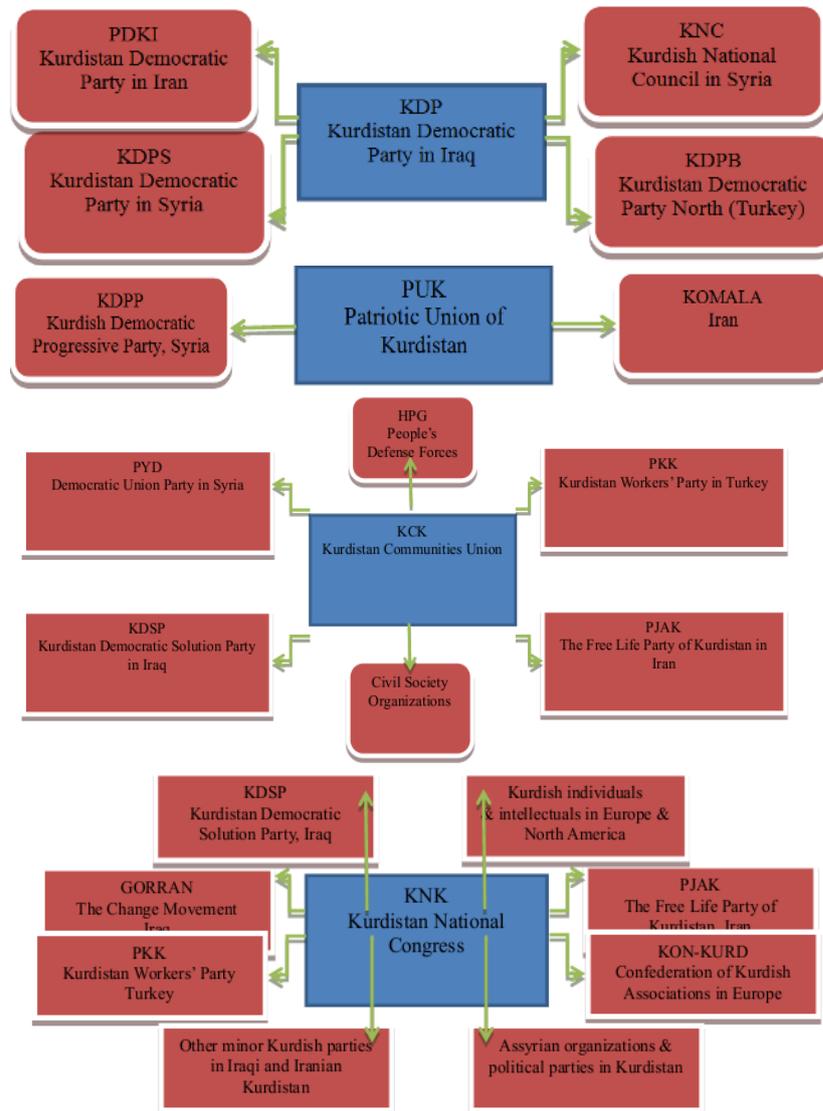
Selama krisis, pemerintah Suriah memang tidak melakukan kekerasan secara langsung terhadap etnis Kurdi. Hal tersebut tidak memungkinkan dilakukan oleh pemerintah Suriah yang harus menghadapi kelompok oposisi yang lebih besar di wilayah Suriah Selatan. Di sisi lainnya, kekuatan pemerintah Suriah pada dasarnya juga semakin melemah seiring banyaknya tekanan dan serangan yang dilakukan oleh kelompok oposisi. Kekerasan terhadap etnis Kurdi di Suriah (YPD) kemudian dilakukan oleh Rusia yang merupakan koalisi dari pemerintah Bashar al-Assad. Alih-alih melakukan serangan terhadap IS di Suriah, pemerintah Rusia juga melancarkan serangan udara terhadap etnis Kurdi (www.bbc.com, 2017). YPG juga mengalami serangan dari Free Syrian Army dan pejuang Nusra Front. Keberadaan pasukan militer Turki yang telah menjaga wilayah perbatasan dan beberapa kali melakukan serangan terhadap YPG juga menjadi pertimbangan rasional bagi pemerintah Suriah untuk tidak melakukan kekerasan langsung terhadap etnis Kurdi. Dalam hal ini, pemerintah Suriah menerapkan kebijakan yang sangat pragmatis. Hal tersebut justru meningkatkan tendensi bagi kelompok separatis (*territorial and ethnic nationalism*).

Peter Ferdinand (1998) menyatakan bahwa ketika perseteruan semakin meningkat dan menimbulkan ketidakamanan dalam negara, maka nasionalisme yang dapat bertahan adalah *ethnic nationalism* ketimbang *civic nationalism*. Etnonasionalisme kemudian diaktualisasikan dalam bentuk tuntutan *secession*. Hal tersebut dalam level lokal dapat meningkatkan tendensi bagi kelompok separatis (Tikhomirov, 2000). Perseteruan dan kekerasan yang dialami oleh etnis Kurdi dan kelompok-kelompok oposisi (FSA dan Al Nusra) selama krisis politik kemudian meningkatkan tendensi upaya *secession* etnis Kurdi Suriah.

Aliansi Etnis Kurdi di Perbatasan

Suhrke dan Noble (1981) menyatakan bahwa dukungan yang diberikan berdasarkan faktor genetik oleh *blood brothers* berdampak signifikan bagi etnis yang sedang menghadapi pertikaian, baik dengan negara maupun dengan kelompok etnis lainnya. Selama krisis politik Suriah, pasukan militer Kurdi Suriah mendapatkan dukungan dari etnis Kurdi yang tinggal di wilayah perbatasan Irak dan Turki, guna melawan pemerintah Bashar Al-Assad dan sekutunya.

Gambar II. Afiliasi Kurdi



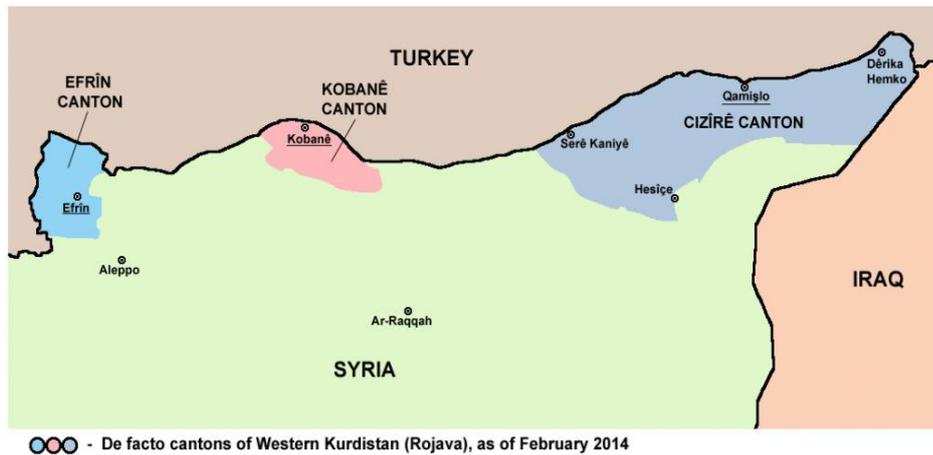
Sumber: Hevian, 2013.

Adanya afiliasi antara KDP Irak dan KNC –yang merupakan persatuan 16 partai Kurdi di Suriah, mempermudah Massoud Barzani untuk mengkoordinasikan dan menggerakkan etnis Kurdi Suriah. KNC yang merupakan satu-satunya partai Kurdi yang bergabung dengan SNC (Syria National Council) berupaya untuk melakukan lobi-lobi politik terhadap partai-partai lainnya, untuk memperjuangkan otonomi bagi etnis Kurdi. Massoud Barzani juga berupaya mempersatukan partai-partai Kurdi di Suriah dengan membentuk Kurdish Supreme Committee. Hal ini mengindikasikan adanya kecenderungan untuk membuat etnis Kurdi di Suriah bergabung dengan wilayahnya (iredentisme) di masa-masa mendatang. Massoud Barzani berlomba-lomba dengan pemimpin PKK Abdullah Ocalan untuk mengintegrasikan etnis Kurdi Suriah dalam wilayah kekuasaannya. Kedua pemimpin partai tersebut juga berlomba untuk menjadi pemimpin Kurdistan (www.ecfr.eu, 2013).

Migrasi besar-besaran yang dilakukan oleh para pengungsi Suriah selama krisis, memberikan peluang bagi etnis Kurdi di Irak dan Suriah untuk melakukan interaksi dan mobilisasi etnis. Selama krisis, diperkirakan ribuan etnis Kurdi di

Suriyah melarikan diri dan mencari perlindungan ke wilayah Kurdi di Irak (www.bbc.com, 2013). Data menyebutkan bahwa pengungsi Kurdi di Suriyah mencapai 200.000 orang dan pemerintah KRG telah mengeluarkan jutaan dollar untuk memenuhi kebutuhan mereka (www.aljazeera.com, 2014). Banyaknya pengungsi yang masuk ke wilayah Kurdistan Irak serta serangan yang dilakukan oleh IS kemudian menarik pasukan *peshmerga* untuk ikut terlibat dalam krisis yang terjadi.

Gambar III. Perbatasan Wilayah Kurdi Suriyah



Sumber: thekurdishproject.org, 2015.

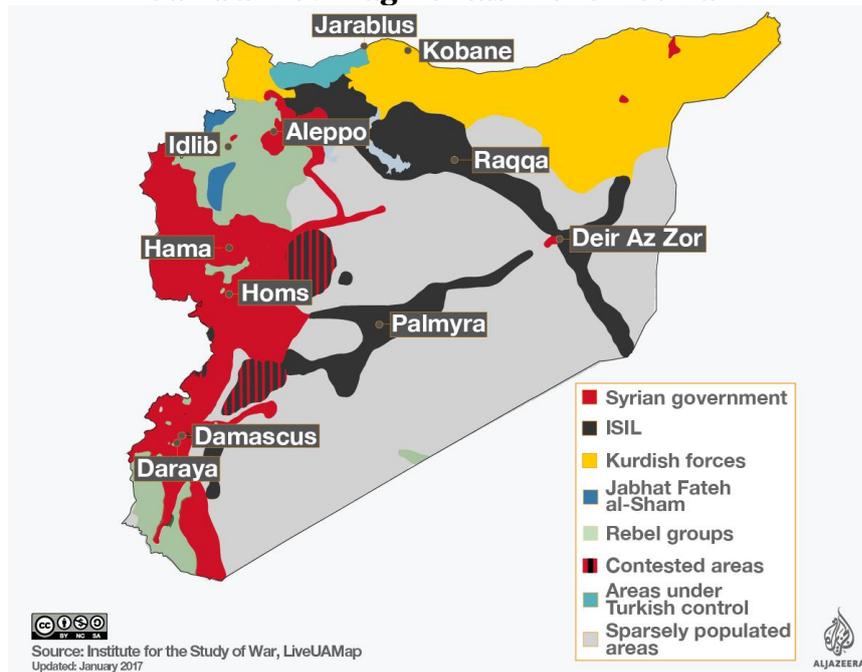
Selain memicu keterlibatan *peshmerga*, pejuang etnis Suriyah juga mendapatkan pelatihan perang serta menggunakan wilayah KRG untuk berlindung. Salah satu sumber di Kurdistan Irak menyatakan bahwa Massoud Barzani memberikan pelatihan perang terhadap pengungsi Kurdi Suriyah yang berhasil melarikan diri dan mencari perlindungan di KRG, serta mengirimkan suplai senjata ke wilayah Kurdi di Suriyah (ekurd.net, 2013). Pasukan tersebut dikenal dengan nama Syrian Kurdish Peshmerga atau Rojava's Peshmerga (www.aranews.net, 2013). Mayor Jenderal *peshmerga* Irak menyatakan bahwa kelompoknya telah memberikan pelatihan kepada 3.000 pasukan *peshmerga* Suriyah (www.aranews.net, 2013). Upaya yang sama juga dilakukan oleh PUK, yang memberikan dukungan terhadap YPG (www.ecfr.eu, 2013).

Tidak hanya mendapatkan dukungan dari etnis Kurdi di Irak, etnis Kurdi di Suriyah juga mendapatkan dukungan dari etnis Kurdi di Turki dan Iran (www.atlanticcouncil.org, 2016). Salah seorang pejuang etnis Kurdi Zind Ruken juga membenarkan adanya keterkaitan antara YPG Suriyah dengan PKK Turki dan PJAK Iran. Dalam pernyataannya, Zind Ruken menyatakan "*sometimes I'm a PKK, sometimes I'm a PJAK (the PKK allied in Iran), sometimes I'm a YPG. It doesn't really matter. They are all members of the PKK*" (www.atlanticcouncil.org, 2016). PJAK Iran, PYD Suriyah, dan KDSP Irak berada di bawah satu payung besar KCK -Kurditan Committee Union, yang merupakan aliansi yang dibentuk sejak tahun 2007 di bawah kepemimpinan PKK (www.trtworld.com, 2018). Selain itu, berdasarkan data Atlantic Council, korban YPG selama krisis politik Suriyah merupakan etnis Kurdi dari beberapa negara. Terdapat 359 korban yang merupakan warga negara Turki, 323 warga negara Suriyah, 31 warga negara Iran, serta 7 warga negara Irak (www.atlanticcouncil.org, 2016).

Dalam perkembangannya saat ini, etnis Kurdi di Suriah memang telah mendeklarasikan otonominya secara unilateral dengan bantuan dan dukungan dari aliansi etnis. Mereka berhasil menguasai kontrol atas wilayah Kurdi Suriah. YPD juga telah membentuk pemerintahan Majelis sebagai badan legislatif dan Dewan Rakyat di tiga provinsi Suriah Utara yang bertugas memberikan pelayanan terhadap etnis Kurdi Suriah (Baas, 2016). Peningkatan tendensi etnis Kurdi di Suriah untuk melakukan secession juga tidak terlepas dari keberadaan sumber daya alam yang melimpah di wilayah Suriah Utara. Wilayah Kurdi di Suriah merupakan wilayah yang memiliki sumber air, minyak dan gas. Cadangan minyak dan gas yang sangat besar terkonsentrasi di wilayah Cizire yang mampu memproduksi minyak dengan kapasitas mencapai hampir 440.000 (Baas, 2016). Dikatakan bahwa 60% cadangan minyak di Suriah berada di bawah kontrol YPG, meliputi wilayah Rmaylan, Til Kojer, dan Jibis (anfenglish.com, 2013). Baiq Wardhani menyatakan bahwa keberadaan sumber daya alam dapat menggerakkan, memperlama, dan menjadi sumber finansial bagi konflik kekerasan, termasuk perjuangan upaya *secession*. Berkaitan dengan hal tersebut, YPG tidak hanya berhasil menguasai wilayah tersebut tetapi juga melakukan eksplorasi minyak dan menjualnya kepada pihak yang tidak diketahui dengan harga di bawah harga pasar (Baas, 2016). Hasil penjualan minyak tersebut kemudian dipakai sebagai sumber finansial bagi upaya *secession* etnis Kurdi.

Meski demikian, etnis Kurdi Suriah tidak mendapatkan dukungan dari pihak-pihak eksternal di luar aliansi. Baik pemerintah, kelompok oposisi, maupun pemerintah negara-negara lain menolak memberikan pengakuan atas deklarasi unilateral tersebut. Mereka semua takut jika otonomi tersebut akan dimanfaatkan oleh etnis Kurdi di Suriah untuk mempersiapkan diri menuju upaya pemisahan diri dari negara. Baik pemerintah, kelompok oposisi, maupun pemerintah di negara-negara lain masih menginginkan Suriah menjadi negara yang utuh. Mereka hanya menginginkan krisis politik di Suriah dapat diselesaikan melalui pergantian kepemimpinan, dengan pengunduran diri Bashar al-Assad sebagai Presiden Suriah.

Gambar IV. Fragmentasi Politik Suriah



Sumber: www.aljazeera.com, 2016

Dari gambar di atas dapat diketahui bahwa terjadi fragmentasi di Suriah mengikuti krisis politik yang terjadi sejak tahun 2011. Wilayah yang berada di bawah kontrol pemerintah Suriah semakin berkurang seiring meningkatnya perlawanan kelompok oposisi yang berhasil mengamankan beberapa wilayah lokal. Selain kelompok oposisi, juga ada kelompok teroris IS dan Jabhat Fateh al-Sham (the Nusra Front) yang memanfaatkan kekacauan yang terjadi selama krisis politik, untuk mengokupasi beberapa wilayah di Suriah. Keberadaan IS dan Jabhat Fateh al-Sham tidak hanya mengancam pemerintah tetapi juga kelompok-kelompok oposisi di Suriah.

Kesimpulan

Banyaknya oposisi dan perlawanan yang harus dihadapi selama krisis membuat perhatian pemerintah Suriah terpecah-pecah. Hal ini kemudian menciptakan peluang dan ruang gerak bagi etnis Kurdi di Suriah untuk melakukan upaya *secession* terhadap pemerintah Suriah. Etnis Kurdi di Suriah berhasil menguasai wilayah Suriah bagian Utara yang berbatasan langsung dengan Irak dan Turki. Krisis politik Suriah ini berkembang menjadi sangat kompleks, dengan banyaknya aktor yang muncul dan terlibat, dengan membawa kepentingan yang berbeda-beda. Kompleksitas tersebut dapat menghambat upaya penyelesaian krisis politik di Suriah.

Selama ini aliansi etnis yang terbentuk di antara etnis Kurdi masih terpecah di bawah kepemimpinan Abdullah Ocalan (PKK) dan Massoud Barzani (KDP). Hal ini tentu saja dapat melemahkan kekuatan Etnis Kurdi. Selain itu banyak oposisi yang menentang perjuangan etnis Kurdi melakukan upaya *secession* di Suriah. Oleh karena itu, lebih baik jika etnis Kurdi berupaya untuk mengkonsolidasikan aliansi yang sudah terbentuk dan dibangun sebelumnya. Di sisi lainnya, etnis Kurdi di perbatasan diharapkan dapat lebih memaksimalkan diaspora Kurdi di

wilayah-wilayah lainnya, yang terus melakukan lobi-lobi politik untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat internasional.

Referensi

Buku

- Lake, David A. dan Donald Rothchild. 1998. *The International Spread of Ethnic Conflict: Fear, Diffusion, and Escalation*. New Jersey: Princeton University Press
- Meho, Lokman I. dan Kelly L. Maghlaughlin. 2001. *Kurdish Culture and Society: an Annotated Bibliography*. London: Greenwood Publishing Group
- Tikhomirov, Vladimir. 2000. *The Political Economy of Post-Soviet Russia*. London: Palgrave Macmillan Press Ltd
- Yildiz, Kerim. 2005. *The Kurds in Syria: The Forgotten People*. London: Pluto Press
- . 2007. *The Kurds in Iraq: Past, Present, and Future (Revised Edition)*. London: Pluto Press in association with Kurdish Human rights Project
- Wardhani, Baiq. 2010. *Diplomacy and Ethnosecessionism: Post New Order Indonesia 1998-2004*. Saarbrücken: Lambert Academic Publishing
- . 2012. *On Secession and Multiculturalism*. Surabaya: CSGS

Journal, Report, Working Paper

- Baas, Saskia. 2016. *Syria Armed Opposition: A spotlight on the moderates*. Sana Dipatch No.5, January
- Bozarlsan, Hamit. 2014. The Kurds and Middle Eastern “State of Violence” the 1980s and 2010s. dalam *Kurdish Studies*, Vol.2 No.1 May
- Hevian, Rodi. 2013. The Main Kurdish Political Parties in Iran, Iraq, Syria, and Turkey: A Research Guide. Dalam *Middle East Review of International Affairs*. Vol. 17, No. 2 (Summer)
- İşyar, Ömer Göksel. 2008. Definition and Management in International Crises. dalam *Perceptions*. Winter
- KurdWatch. 2010. *Stateless Kurds in Syria Illegal invaders or victim of nationalistic policy?*. Report No.2 March
- Smith, Ben dan Claire Mills. 2015. Iraq and Syria – Developments in 2015. Briefing Paper Number CBP 7261
- Klopp, Jacqueline M. dan Elke Zuern. 2006. *The Politics of Violence in Democratization Lessons from Kenya and South Africa*.

Situs Internet

- Abdulla, Namo. 2014. *The Rise of Syria’s Kurds*. Diakses dari [<http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2014/01/rise-syria-kurds-201412353941189707.html>]
- Al Jazeera. 2016. *Syria’s Civil War Explained*. Diakses dari [<http://www.aljazeera.com/news/2016/05/syria-civil-war-explained-160505084119966.html>]
- Anonim. 2013. *Muslim: 60% Syrian of Syrial Oil Controlled by Kurds*. Diakses dari [<http://anfenglish.com/news/muslim-60-of-syrian-oil-controlled-by-kurds>]
- . 2015. *Syria (Rojava or Western Kurdistan)*. Diakses dari [<http://thekurdishproject.org/kurdistan-map/syrian-kurdistan/>]
- . 2015. *KRG: Kurdistan Regional Government*. [<http://thekurdishproject.org/history-and-culture/kurdish-democracy/krk-kurdistan-regional-government/>]

- , 2016. *Why is there a war in Syria?*. Diakses dari [http://www.bbc.com/news/world-middle-east-35806229] pada 22 Desember 2016
- , 2016. *Syria Profile – Overview*. Diakses dari [http://www.bbc.com/news/world-middle-east-14703910]
- , 2016. *Syria: the Story of the Conflict*. [http://www.bbc.com/news/world-middle-east-26116868]
- , 2017. *Syria Country Profile*. Diakses dari [http://www.bbc.com/news/world-middle-east-14703856]
- , 2017. *Syria Profile – Timeline*. Diakses dari [http://www.bbc.com/news/world-middle-east-14703995]
- , 2017. *Conflict Background*. Diakses dari [http://www.iamsyria.org/conflict-background.html]
- Ammar, 2011. *Persecution and Discrimination against Kurdish Citizens in Syria*. Diakses dari [http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/session12/SY/KIS-KurdsinSyria-eng.pdf]
- BBC News, 2016. *Iraq has failed as a state - deputy PM of Iraqi Kurdistan*. Diakses dari [http://www.bbc.com/news/world-middle-east-38249078]
- Bechev, Dimitar, 2013. *Syria: The Kurdish View*. Diakses dari [http://www.ecfr.eu/article/commentary_syria_the_kurdish_view142]
- Bröker, Laura, 2016. *Any hope for a Kurdish State? The United States, Germany and the Prospects of Kurdish Self-Determination*. Diakses dari [https://us.boell.org/sites/default/files/kurds-3.pdf]
- Bruneau, Eric, 2013. *Iraqi Kurdish Rivalries Play Out Outside the Border: Taking the Fight to Syria*. Diakses dari [http://ekurd.net/mismas/articles/misc2013/6/state7110.htm]
- Burns, Catherine, 2016. *10 Perkara yang Perlu Diketahui tentang Aleppo dan Suriah*. Diakses dari [http://www.bbc.com/indonesia/dunia-38325140]
- CIA The World Factbook, 2017. *Syria*. Diakses dari [https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/sy.html]
- CIA, 2017. *Syria*. Diakses dari [https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/sy.html]
- CNN Library, 2016. *Syrian Civil War Fast Facts*. Diakses dari [http://edition.cnn.com/2013/08/27/world/meast/syria-civil-war-fast-facts/]
- Council on Foreign Relations, 2015. *Assad Establishes “Arab Belt” in Syria’s Northeast*. Diakses dari [https://www.cfr.org/middle-east-and-north-africa/time-kurds/p36547#!/]
- Council on Foreign Relations, 2015. *Syrian Kurds Found PYD*. Diakses dari [https://www.cfr.org/middle-east-and-north-africa/time-kurds/p36547#!/]
- Davidson, Adam dan Ayham Kamel, 2012. *How Economic Reforms Are Contributing To The Conflict In Syria*. Diakses dari [http://www.npr.org/sections/money/2012/05/29/153916783/how-economic-reforms-are-contributing-to-the-conflict-in-syria]
- Jaboori, Rafid, 2013. *Iraq’s Kurds focus on Autonomy*. Diakses dari [http://www.bbc.com/news/world-middle-east-24181951]
- KRG, 2012. *About Kurdistan*. Diakses dari [http://www.krg.us/aboutkurdistan/]
- Kurdistan Regional Government-Iraq, 2012. *About Kurdistan*. Diakses dari [http://www.krg.us/aboutkurdistan/]

- Marboen, Ade (ed). 2016. *Turki Serang Sasaran ISIS dan PYD di Suriah Utara*. Diakses dari [<http://www.antaraneews.com/berita/580240/turki-serang-sasaran-isis-dan-pyd-di-suriah-utara>]
- Mohammed, Ala Jabar. 2013. *The Politics of Iraqi Kurdistan: Towards Federalism or Secession?*. Diakses dari [http://www.canberra.edu.au/researchrepository/file/3bee44do-f162-8598-ad64-033aa44dd1e3/1/full_text.pdf]
- van Wilgenburg, Wladimir. 2016. *Rojava's Peshmerga forces refuse to join Azaz battle to avoid confrontation with fellow Kurdish troops*. Diakses dari [<http://aranews.net/2016/06/rojavas-peshmerga-forces-refuse-to-join-azaz-battle-to-avoid-confrontation-with-fellow-kurdish-troops/>]
- Ade Marboen (ed). 2016. *Turki Serang Sasaran ISIS dan PYD di Suriah Utara*. Diakses dari [<http://www.antaraneews.com/berita/580240/turki-serang-sasaran-isis-dan-pyd-di-suriah-utara>]
- Stein, Aaron dan Michelle Foley. 2016. *The YPG-PKK Connection*. Diakses dari [<https://www.atlanticcouncil.org/blogs/menasource/the-ypg-pkk-connection>]
- Anonim. 2018. *The US denies ties between the YPG and PKK. This is how they're linked*. Diakses dari [<https://www.trtworld.com/magazine/the-us-denies-ties-between-the-ypg-and-pkk-this-is-how-they-re-linked-21593>]